



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL KHOLIQ**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **739877**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 4790 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
6. Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 192.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 110 D/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV M/T MOBIL PENUMPANG Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GEB. 1.5 MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI



	Rp. 110.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.319.378.989
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.721.878.989
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.421.878.989

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.